

Judul : Infrastruktur daerah tidak boleh dilupakan
Tanggal : Selasa, 21 November 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Ada Proyek Strategis IKN

Infrastruktur Daerah Tidak Boleh Dilupakan

Senayan menyoroti pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah yang dirasa mandeg karena kekurangan anggaran. Padahal, program kerakyatan ini bermanfaat untuk mendorong perekonomian daerah.

ANGGOTA Komisi V DPR Sadarestuwati awalnya mengapresiasi pembangunan jalan-jalan daerah terpencil di sejumlah titik yang sampai saat ini belum memiliki infrastruktur. Dia berharap, pembangunan jalan terus dilanjutkan.

"Begitu juga dengan pembangunan untuk IJD (Inpres Jalan Daerah) yang juga sudah dilaksanakan. Namun, kami mohon usulan yang sudah ada secara bertahap dilanjutkan lagi untuk 2024, baik usulan (Kabupaten) Jombang maupun Nganjuk," harap Sadarestuwai dalam rapat kerja Komisi V DPR bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/11/2023).

Restu juga menyoroti sejumlah program kerakyatan yang jumlahnya justru berkurang di

tahun 2024. Program tersebut, antara lain pembangunan rumah susun yang jumlahnya hanya mencapai 578 unit atau 8 tower saja. Sementara, Kementerian PUPR malah mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pembangunan rumah susun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pertahanan Keamanan (Hankam) di Ibu Kota Negara (IKN) pada tahun 2024.

Restu menyayangkan berkurangnya bantuan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang hanya berjumlah 5.046 unit di 2024.

"Kalau saya hitung, berarti per anggota tidak sampai seribu unit. Ini jauh dari tahun lalu (2023, red)," ungkapnya.

Begitu juga program-program pertanian. Dia meminta program yang dapat mendukung produktivitas pertanian, seperti

pembangunan bendungan dan irigasi juga ditingkatkan.

Politisi PDI Perjuangan Dapil Jawa Timur VIII ini berharap, Kementerian PUPR hendaknya memperhatikan masukan dari dewan. Hal ini juga sebagai amanah dari Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau yang dikenal dengan nama M3.

"Kami berharap banyak untuk program kerakyatan yang bisa kami bawa atau berikan kepada masyarakat," harapnya.

Hal senada dilontarkan anggota Komisi V DPR Syahrul Aidi Maazat. Dia juga menyampaikan apresiasi atas segala upaya dan kerja keras Menteri Basuki dan jajaran dalam menyelesaikan persoalan termasuk pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Semoga menjadi amal saleh nantinya," doanya.

Namun demikian, dia menyayangkan program kerakyatan yang ada di daerah pilihannya. Riau, belum berjalan dengan baik.

Dia lalu menyoroti program tahun 2024 di Direktorat Sumber

Daya Air Kementerian PUPR, khususnya di Balai Wilayah Sungai, yang belum memperhatikan kepentingan dapilnya.

"Saya dapat informasi untuk pantai tidak ada program tahun 2024. Alasannya karena selama ini, saya nanya dari (pembiayaan) SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) sudah habis katanya. Ada juga informasi, SBSN-nya ada Rp 200 miliar, tapi Riau tidak kebagian," ujarnya.

Syahrul mengatakan, setidaknya ada dua program yang sangat dinanti masyarakat di daerah pilihannya. Pertama, penataan sungai di daerah Kuala Selat yang diharapkan pembangunannya tahun 2024 tapi tidak masuk dalam perencanaan tahun depan.

Kedua, sungai Kampar, yang dikerjakan tahun ini masih dalam progres. "Harusnya bisa dikerjakan ke tahun depan," sambungnya.

Anggota Fraksi PKS ini menjelaskan, luas kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) III Provinsi Riau ini memang sangat besar. Untuk lingkup di Ordo I saja, itu panjangnya bisa mencapai 2.800 kilometer yang terdiri

dari empat sungai.

"Kasusnya ratusan cuma penanganan turap tebingnya hanya 5 titik dan ironisnya tidak ada *Detail Engineering Design* (DED) untuk kasus-kasus baru semenjak tahun 2021," jelasnya.

Syahrul mengaku sudah mengadukan masalah ini tapi sayangnya, untuk BWS tidak memiliki DED tahun 2022 dan 2023.

"Tahun 2024 ada kasus kritis saya usulkan dan itu dari masyarakat, tapi alasannya tidak ada DED. Jadi saya malu juga di depan masyarakat jadinya. Masa beberapa tahun tidak ada DED," sesalnya.

Politisi dapil Riau II ini pun menyayangkan tidak adanya dukungan anggaran untuk penataan sungai-sungai di Riau. Kondisi ini kontras dengan penganggaran sungai di Kepulauan Jawa.

"Kalau saya bandingkan dengan program turap tebing di Pulau Jawa, di Banten, yang saya kunjungi hampir Rp 1 triliun. Sementara 4-5 sungai besar di Riau ini hanya 5 titik dan hanya Rp 5 miliar. Rasanya tidak adil," ungkapnya. ■ KAL